

ABSTRAK

Nurul Khomariyah Syahroni (01656200037)

“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DITERBITKAN KEMBALI SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH PIHAK LAIN MELALUI PROGRAM PTSL OLEH KANTOR PERTANAHAN PALU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/G/2020/PTUN.PL)” (xiii + 119 halaman; 1 lampiran)

Sertipikat merupakan suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Perlindungan hukum didapatkan jika tanah tersebut didaftarkan dikarenakan tujuan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pendaftaran tanah merupakan salah satu alat negara untuk menciptakan perlindungan hukum terkait kepemilikan tanah dan pemilik tanah. Dalam praktiknya, ketika negara melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk menciptakan kepastian hukum terjadi maladministrasi ketika sertipikat tanah tumpang tindih antara sebidang tanah dan sebidang tanah lainnya. Bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum pemegang sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik atas nama orang lain yang terbit berdasarkan program PTSL. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Tanah yang telah mempunyai sertipikat diterbitkan kembali sertipikat program PTSL. Pihak yang merasa dirugikan dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN dapat mengajukan upaya-upaya hukum agar mendapatkan keadilan.

Referensi: 30 (1995-2019)

Kata Kunci: Perlindungan hukum, tumpang tindih, sertipikat

ABSTRACT

Nurul Khomariyah Syahroni (01656200037)

“LEGAL PROTECTION OF PROPERTY CERTIFICATE HOLDERS WHICH LAND IS REISSUED PROPERTY CERTIFICATES BY OTHER PARTIES THROUGH THE PTSL PROGRAM BY THE PALU LAND OFFICE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER. 12/G/2020/PTUN.PL)

(xiii +119 Pages; 1 attachments)

A certificate is a proof of ownership of land rights. Legal protection is obtained if the land is registered because the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection. Land registration is one of the state's tools to create legal protection related to land ownership and land owner. In practice, when the state implements a complete systematic land registration (PTSL) program to create legal certainty, maladministration occurs when land certificates overlap between one plot of land and another. How are legal protections and legal remedies for holders of certificates of property rights which are reissued with certificates of property rights on behalf of others, which are issued under the PTSL program. The research was conducted using a normative juridical research method and using a statutory, case and conceptual approach. Land that already has a certificate is reissued a certificate for the PTSL program. Parties who feel aggrieved by the legal products issued by BPN can apply for legal remedies in order to obtain justice.

Reference: 30 (1995-2019)

Keywords : Legal protection, overlapping, certificate

